BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara adalah kumpulan nilai-nilai luhur yang harus dipahami oleh seluruh masyarakat dan menjadi panduan dalam kehidupan ketatanegaraan untuk mewujudkan bangsa dan Negara yang adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat. Melalui nilai-nilai Empat Pilar, maka diharapkan dapat mengukuhkan jiwa kebangsaan, nasionalisme, dan patriotisme generasi penerus bangsa untuk semakin mencintai dan berkehendak untuk membangun negeri. Empat Pilar ini akan dapat menjadi panduan yang efektif dan nyata, apabila semua pihak, segenap elemen bangsa, para penyelenggara Negara dan masyarakat konsisten mengamalkannya dalam arti yang seluas-luasnya.

Pengertian pilar adalah tiang penguat, dasar, yang pokok, atau induk. Penyebutan Empat Pilar kehidupan berbangsa dan bernegara tidaklah dimaksudkan bahwa keempat pilar tersebut memiliki kedudukan yang sederajat. Setiap pilar memikili tingkat, fungsi dan konteks yang berbeda. Pada prinsipnya Pancasila sebagai ideologi dan dasar Negara kedudukannya berada di atas tiga pilar yang lain. (Pimpinan MPR dan tim kerja sosialisasi Empat Pilar, 2012:6)

Pancasila sebagai ideologi dan dasar Negara harus menjadi jiwa yang menginspirasi seluruh pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila baik sebagai ideologi dan dasar Negara

sampai hari ini tetap kokoh menjadi landasan dalam bernegara. Pancasila juga tetap tercantum dalam konstitusi Negara kita meskipun beberapa kali mengalami pergantian dan perubahan konstitusi. Ini menunjukan bahwa Pancasila merupakan konsensus nasional dan dapat diterima oleh semua kelompok masyarakat Indonesia. Pancasila terbukti mampu memberi kekuatan kepada bangsa Indonesia, sehingga perlu dimaknai, direnungkan, dan diingat oleh seluruh komponen bangsa.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah konstitusi Negara sebagai landasan konstitusional bangsa Indonesia yang menjadi hukum dasar bagi setiap peraturan perundang-undangan di bawahnya. Oleh karena itu, dalam Negara yang menganut paham konstitusional tidak ada satupun perilaku penyelenggara Negara dan masyarakat yang tidak berlandaskan konstitusi.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bentuk Negara yang dipilih sebagai komitmen bersama. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah pilihan yang tepat untuk mewadahi kemajemukan bangsa. Oleh karena itu komitmen kebangsaan akan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi suatu “keniscayaan” yang harus dipahami oleh seluruh komponen bangsa. Dalam Pasal 37 ayat (5) secara tegas menyatakan bahwa khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan karena merupakan landasan hukum yang kuat bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat diganggu gugat.

Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan Negara sebagai modal untuk bersatu. Kemajemukan bangsa merupakan kekayaan kita, kekuatan kita, yang sekaligus juga menjadi tantangan bagi kita bangsa Indonesia, baik kini maupun yang akan datang. Oleh karena itu kemajemukan itu harus kita hargai, kita junjung tinggi, kita terima dan kita hormati serta kita wujudkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, memiliki tanggung jawab untuk mengukuhkan nilai-nilai fundamental kehidupan berbangsa dan bernegara, sesuai dengan mandat konstitusional yang diembannya. Dalam kaitan ini, MPR melaksanakan tugas-tugas konstitusionalnya dengan menjungjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa. Salah satu upaya yang dilakukan MPR adalah dengan melaksanakan tugas untuk memberikan suatu pemahaman nilai-nilai luhur bangsa yang terdapat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika kepada masyarakat.

Terbentuklah Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara untuk mengingatkan kembali komitmen seluruh komponen bangsa agar melaksanakan dan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara selalu menjungjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa dalam rangka mewujudkan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Para anggota MPR RI memaknai Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dengan menjalankan rutinitas sebagai kalangan elit politik atau

aktor politik yang memerankan diri untuk dan atas nama rakyat, semata-mata untuk memahami dan menerapkan pada dirinya sendiri tentang segala perbedaan. Perbedaan suku, agama, ras, dan adat, tidak dapat dibanding-bandingkan satu sama lain.

Perilaku politik adalah kegiatan-kegiatan yang tidak diminta sebagai bagian dari peran formal seseorang dalam organisasi, tetapi yang mempengaruhi, atau mencoba mempengaruhi distribusi keuntungan dan kerugian di dalam organisasi.[1]

Pekerjaan utama para aktor politik atau elit politik sebenarnya untuk mensejahterakan rakyat dan kemajuan bangsa Indonesia. Tetapi pada kenyataannya, banyak elit politik yang bertindak hanya atas nama kelompok partai atau bahkan mementingkan kepentingan pribadi. Disinilah ketidak-konsistenan tersebut, seperti konflik antar fraksi, tidak hadir dalam sidang paripurna, hingga kasus korupsi, masih banyak terjadi di kalangan elit politik yang mengatasnamakan kepentingan rakyat dan Negara. Hal tersebut tidak mencerminkan makna dari nilai-nilai Empat Pilar Kehidupan Bebangsa dan Bernegara. Memudarnya nilai-nilai Empat Pilar, mengakibatkan degradasi moral terjadi dimana-mana, kualitas moral para elit politik maupun bangsa ini dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah rendahnya pemahaman atas pemaknaan Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Untuk memaknai Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara sebenarnya tidaklah sulit, dengan saling menghargai satu sama lain, baik itu dalam

[1] http://ellopedia.blogspot.com/2010/09/perilaku-politik.html 24/03/2014; 11:20 WIB

berpendapat, berbagi ide maupun gagasan, bermasyarakat, hormat menghormati, toleransi, menghadiri rapat/sidang paripurna, bersikap adil, tidak melakukan tindakan korupsi, dan lain-lain, terutama sebagai budaya timur maka utamakan sopan dan santun. Maka para elit politik tidak akan dipandang sebelah mata oleh masyarakat, sehingga akan dengan mudah para anggota MPR RI untuk menerapkan Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara kepada masyarakat menjadi acuan kehidupan untuk kesejahteraan dan kemajuan bersama.

Menurut Wakil Ketua MPR RI periode 2009-2014, Pak Hajriyanto Y. Tohari,

> "Ada kesalahan pemaknaan yang selama ini terjadi dimasyarakat. Seolah-olah, kata pilar itu sebagaimana tiang-tiang dalam sebuah bangunan. Sementara masyarakat menganggap Pancasila merupakan dasar Negara, bukan semata tiang. Padahal sesuai KBBI, pilar juga bisa berarti dasar, tiang, atau kap silinder berbentuk pegas. Tinggal istilah mana yang akan digunakan. Jadi sesungguhnya tidak ada yang keliru, hanya saja mereka belum menemukan makna pilar sesuai yang dimaksud dalam KBBI".[2]

Menurut Wakil Ketua MPR RI periode 2009-2014, Ibu Melani Leimena Suharli, mengatakan:

> "Harus memahami Pancasila, sebagai acuan langkah hidup dan cara tugas anggota dewan. Dalam Empat Pilar terdapat nilai-nilai luhur bangsa yang tak lekang oleh perubahan zaman. Nilai-nilai luhur bangsa itulah yang akan membentuk karakter bangsa, sehingga akan muncul generasi bangsa yang berpedoman pada nilai luhur bangsa. Jika ini terjadi, selesailah segala permasalahan bangsa".[3]

[2] Wawancara Peneliti, 11 April 2014, di Nusantara III Lt.9 Komplek MPR RI
[3] Wawancara Peneliti, 11 April 2014, di Nusantara III Lt.9 Komplek MPR RI

Para anggota MPR RI harus mempraktekan Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dalam kehidupannya sehari-hari bukan hanya tahu judulnya saja dan tidak dipraktekkan. Karena jika mengerti dengan baik, Empat Pilar tersebut sebenarnya mengatakan bahwa semua masyarakat Indonesia itu sebenarnya satu, dari Sabang sampai Merauke.

Dan para anggota MPR RI yang beropini tentang keprihatinan kepada masyarakat, karena tidak menanamkan nilai-nilai Empat Pilar didalam kehidupan mereka, seharusnya memberikan contoh terlebih dahulu bagaimana menanamkan makna-makna dari Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang ditanamkan didalam kehidupan sehari-hari oleh para anggota MPR RI.

Anggota MPR RI adalah orang-orang pilihan yang mewakili masyarakat Indonesia, semata-mata untuk memajukan dan mensejahterakan warga Negara Indonesia. Bukan hanya mensosialisasikan Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, melainkan mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka, sehingga menjadi contoh yang nyata untuk masyarakat.

Pemilihan nilai-nilai Empat Pilar tidak lain adalah untuk mengingatkan kembali kepada seluruh komponen bangsa agar pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara terus dijalankan dengan tetap mengacu kepada tujuan negara yang dicita-citakan, serta bersatupadu mengisi pembangunan, agar bangsa ini dapat lebih maju dan sejahtera.

Perbedaan makna yang terjadi tentang Empat Pilar saat ini, jika dikaitkan dengan aspek komunikasi tentu hal tersebut bisa dikatakan sebagai sebuah gejala komunikasi yang patut dipelajari.

Kata komunikasi atau *communication* secara etimologis berkaitan dengan dua kata lainnya *communion* dan *community* berasal dari bahasa Latin *communcare* yang berarti *to make common*—membuat sesuatu menjadi bersama-sama atau *to share*—membagi yang artiannya diperluas menjadi misalnya, komunikasi adalah proses atau tindakan untuk mengalihkan pesan dari suatu sumber kepada penerima melalui saluran dalam situasi adanya gangguan dan interferensi. Ada pula yang mengelaborasi definisi ini menjadi, komunikasi adalah transmisi pesan yang bertujuan untuk memperoleh makna perubahan tertentu. Komunikasi sebagai proses dan tindakan merupakan konsep dari kata "berkomunikasi" atau *communicate* juga berasal dari kata *common* yang artinya membagi, mempertukarkan, mengirimkan, mengalihkan, berbicara, isyarat, menulis, mendayagunakan, menghubungkan *(to share, exchange, send along, transmit, talk, gesture, write, put in use, relate).* (Alo Liliweri, 2011:31)

Terjadinya pergeseran makna yang ada pada saat ini, dalam hal ini adalah tentang Empat Pilar, tidak terlepas dari bagaimana proses komunikasi itu terjadi. Ketika suatu pemahaman tentang makna yang ada pada saat ini tidak sesuai dengan makna yang dulu, maka hal tersebut membuktikan bahwa ada suatu problema yang membuat makna Empat Pilar data menjadi berbeda. Problema atau masalah itu bisa dilihat dari proses komunikasi yang terjadi.

Menurut Baldwin dalam buku Komunikasi Politik proses komunikasi:

> Pertama, komunikasi merupakan proses. Kedua, proses alami dari komunikasi, salah satunya dapat dilihat dari awal hingga akhir percakapan. Ketiga, komunikasi pada hakikatnya merupakan suatu simbol. Keempat, hal yang mengaitkan antara proses dan simbol adalah makna yang merupakan pusat dari pendefinisian komunikasi. Kelima, lingkungan merupakan situasi/konteks dimana komunikasi terjadi. (Hikmat, 2010:10-11)

Jika kita tarik kedalam permasalahan ini, fakta pada awalnya mengatakan bahwa makna 4 Pilar itu dapat diartikan secara berbeda oleh banyak orang dan kalangan. Cara pandang yang digunakan oleh para anggota MPR dari beberapa fraksi yang mempunyai heterogenitas demikian kompleks dengan potensi disintegritas yang tinggi, tentunya akan berbeda disetiap individu dalam memaknai arti dari Empat Pilar. Proses komunikasi yang dilakukan oleh anggota MPR dalam konsepsi fenomenologi akan melahirkan motif-motif tertentu, dan motif tersebut akan berbeda dalam membangun makna didalam usaha untuk mendalami makna Empat Pilar itu sendiri.

Kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia secara alamiah mengalami suatu pergeseran atau perubahan yang signifikan dari semua sendi kehidupan. Semua dampak yang muncul dalam proses tersebut harus segera ditanggapi dan dipertimbangkan guna memperkuat suasana kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam menyongsong era yang semakin modern, sehingga pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara tetap menjadi koridor mencapai tujuan negara.

Pergeseran dan perbedaan makna Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara ini dapat kita temukan di kalangan anggota MPR RI periode 2009-2014 yang memiliki keanekaragaman sosial. Dalam penelitian ini, peneliti ingin menjadikan beberapa anggota MPR RI periode 2009-2014 sebagai subjek di penelitian ini.

Terjadinya perbedaan makna Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara saat ini erat kaitannya dengan konstruksi makna yang dibentuk oleh para anggota MPR RI periode 2009-2014. Konstruksi makna adalah sebuah proses saat individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensors mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka.[4] Pembentukan makna adalah berfikir, dan setiap individu memiliki kemampuan berfikir sesuai dengan kemampuan serta kapasitas kognitif atau muatan informasi yang dimilikinya. Oleh karena itu, makna tidak akan sama atas setiap individu walaupun objek yang dihadapinya adalah sama. Pemaknaan terjadi karena cara dan proses berfikir adalah unik pada setiap individu yang akan menghasilkan keragaman dalam pembentukan makna.[5]

Penyebutan Empat Pilar kehidupan berbangsa dan bernegara tidaklah dimaksudkan bahwa keempat pilar tersebut memiliki kedudukan yang sederajat. Setiap pilar memiliki tingkat, fungsi, dan konteks yang berbeda. Dalam hal ini, posisi Pancasila tetap ditempatkan sebagai nilai fundamental berbangsa dan bernegara.

---

[4] http://yaomiakmalia.blogspot.com/2012/11/konstruksi-makna-dan-paradigma-html 25/02/2014; 20:27WIB

[5] http://atwarbajari.wordpress.com/tag/pembentukan-makna/ 25/02/2014; 20:28 WIB

Dengan penjabaran diatas peneliti merasa tertarik untuk mengetahui dan mengkaji secara mendalam tentang pemaknaan Empat Pilar bagi anggota MPR RI, maka judul yang diangkat pada penelitian ini adalah: **Konstruksi Makna Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (Studi Fenomenologi Tentang Konstruksi Makna Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Bagi Anggota MPR RI Periode 2009-2014).**

1.2 Rumusan Masalah

Dari beberapa penjabaran yang telah peneliti uraikan di dalam latar belakang masalah penelitian di atas, peneliti dapat membuat rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1.2.1 Rumusan Masalah Makro

"Bagaimana konstruksi makna Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara?"

1.2.2 Rumusan Masalah Mikro

Berdasarkan pada judul penelitian diatas dan pada rumusan masalah yang telah ditentukan berdasarkan latar belakang masalah penelitian, maka peneliti dapat mengambil 4 pertanyaan mikro yang dikenal sebagai identifikasi masalah dalam penelitian ini.

Adapun pertanyaan mikro penelitian ini adalah:

1. Bagaimana **Nilai-nilai** Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang dimaknai oleh Anggota MPR RI Periode 2009-2014?
2. Bagaimana **Motif** Anggota MPR RI periode 2009-2014 dalam memaknai Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara?
3. Bagaimana **Pengalaman** Anggota MPR RI periode 2009-2014 selama memaknai Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara?

1.3 Maksud dan Tujuan Masalah

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan secara mendalam bagaimana konstruksi makna Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara .

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan yang sudah dijelaskan dalam rumusan masalah mengenai identifikasi masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui **Nilai-nilai** Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang dimaknai oleh Anggota MPR RI Periode 2009-2014.
2. Untuk mengetahui **Motif** Anggota MPR RI periode 2009-2014 dalam Memaknai Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.
3. Untuk mengetahui **Pengalaman** Anggota MPR RI periode 2009-2014 selama memaknai Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.
4. Untuk mengetahui dan mengkaji **kontruksi makna** Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara bagi anggota MPR RI periode 2009-2014.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini dapat dilihat dari segi teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu pengetahuan tentang ilmu komunikasi secara umum dan secara khusus terkait dengan konstruksi makna.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan secara praktis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Bagi Peneliti

Dapat dijadikan bahan referensi sebuah pengetahuan dan pengalaman serta penerapan ilmu yang diperoleh peneliti selama studi secara teoritis. Dalam hal ini khususnya mengenai kajian komunikasi dan konstruktivisme.

B. Bagi Akademik

Secara praktis penelitian ini dapat berguna bagi mahasiswa UNIKOM secara umum, dan mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi secara khusus yang dapat dijadikan sebagai literatur dan referensi tambahan terutama bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian pada kajian yang sama.

C. Bagi Instansi MPR RI

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para Anggota MPR RI beserta tim kerja mengenai pemaknaan Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, agar lebih menerapkan serta diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari di kalangan elit politik sebagai wakil rakyat.

D. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat berguna sebagai informasi tentang kajian konstruktivisme dalam memaknai Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang perkembangan, tantangan kekinian, aktualisasi, serta pengaplikasian dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.